



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 47 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 35
TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/PMK.07/2016 tentang Pedoman Umum dan Rincian Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016, yang mengakibatkan penambahan anggaran pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2016 yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang terdapat pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/PMK.07/2016 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Prov/Kab/Kota Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 461);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/PMK.07/2016 tentang Pedoman Umum dan Rincian Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 10 Seri A);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 5 Seri A);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 115 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 115 Seri A);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 40 Seri A);
14. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 903/Kep.1408-Keu/2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Walikota Tasikmalaya

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

15. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 903/Kep.975-Keu/2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 172);
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 177);
21. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 275);
22. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 291) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 35 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 298).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 1.538.254.589.288,18 bertambah/berkurang sejumlah Rp. 445.758.930.308,77 sehingga menjadi Rp. 1.984.013.519.596,95 dengan rincian sebagai berikut :

1. PENDAPATAN

a. Pendapatan Asli Daerah

1)Semula Rp. 248.137.549.136,68

2)Bertambah Rp. 19.794.305.671,00

/Berkurang

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp. **267.931.854.807,68**

b. Dana

Perimbangan

1)Semula Rp. 1.183.074.179.640,00

2)Bertambah Rp. (41.515.393.040,00)

/Berkurang

Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan Rp. **1.141.558.786.600,00**

c. Lain-lain

Pendapatan

Daerah Yang

Sah

1)Semula Rp. 70.311.175.000,00

2)Bertambah Rp. 213.230.994.377,80

/Berkurang

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan Rp. **283.542.169.377,80**

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. **1.693.032.810.785,48**

2. BELANJA

a. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai

1)Semula Rp. 871.112.752.249,78

2)Bertambah Rp. 48.966.854.022,67

/Berkurang

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. **920.079.606.272,45**

2. Belanja Bunga

1)Semula Rp. 0,00

2)Bertambah Rp. 101.920.000,00

/Berkurang

Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan Rp. **101.920.000,00**

3. Belanja Hibah

1)Semula Rp. 63.358.498.000,00

2)Bertambah Rp. 23.177.161.000,00

/Berkurang

Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp. **86.535.659.000,00**

4. Belanja Bantuan Sosial

1)Semula Rp. 2.729.620.758,00

2)Bertambah Rp. 0,00

/Berkurang

Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan Rp. **2.729.620.758,00**

5. Belanja Bantuan Keuangan			
1)Semula	Rp.	1.005.411.000,00	
2)Bertambah	Rp.	0,00	
/Berkurang			
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	1.005.411.000,00	
Setelah Perubahan			
6. Belanja Tidak Terduga			
1)Semula	Rp.	4.405.583.368,00	
2)Bertambah	Rp.	15.050.592.257,10	
/Berkurang			
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah	Rp.	19.456.175.625,10	
Perubahan			
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah	Rp.	1.029.908.392.655,55	
Perubahan			
b. Belanja Langsung			
1. Belanja Pegawai			
1)Semula	Rp.	145.165.976.825,00	
2)Bertambah	Rp.	19.309.099.233,00	
/Berkurang			
Jumlah Belanja Pegawai Setelah	Rp.	164.475.076.058,00	
Perubahan			
2. Belanja Barang dan Jasa			
1)Semula	Rp.	274.295.915.887,40	
2)Bertambah	Rp.	107.089.974.082,00	
/Berkurang			
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	Rp.	381.385.889.969,40	
Setelah Perubahan			
3. Belanja Modal			
1)Semula	Rp.	176.180.831.200,00	
2)Bertambah	Rp.	232.063.329.714,00	
/Berkurang			
Jumlah Belanja Modal Setelah	Rp.	408.244.160.914,00	
Perubahan			
Jumlah Belanja Langsung Setelah	Rp.	954.105.126.941,40	
Perubahan			
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.	1.984.013.519.596,95	
Surplus / (Defisit)	Rp.	(290.980.708.811,47)	
3. PEMBIAYAAN			
a. Penerimaan Pembiayaan			
1)Semula	Rp.	41.831.685.511,50	
2)Bertambah	Rp.	256.249.023.299,97	
/Berkurang			
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp.	298.080.708.811,47	
Setelah Perubahan			
b. Pengeluaran Pembiayaan			
1)Semula	Rp.	5.100.000.000,00	
2)Bertambah	Rp.	2.000.000.000,00	
/Berkurang			
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	7.100.000.000,00	
Setelah Perubahan			
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah	Rp.	290.980.708.811,47	
Perubahan			
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun	Rp.	0,00	
Berkekaan (SILPA) Setelah Perubahan			

Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1B

Perubahan Kedua Atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi penambahan dan pergeseran alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada Tanggal 31 Oktober 2016

Plt. WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. ABAS BASARI

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 303